



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
12. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
13. Usaha bidang perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang memiliki ijin usaha untuk menangkap atau membudidayakan sumberdaya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Objek Pajak perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
15. Objek Pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
 - a. Jalan Tol;
 - b. Pelabuhan laut/sungai/udara;
 - c. Lapangan Golf;
 - d. Industri Semen/Pupuk;
 - e. PLTA, PLTU dan PLTG;
 - f. Pertambangan;
 - g. Tempat Rekreasi; dan
 - h. lain-lain yang sejenis.
16. Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah).
17. Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan PBB-P2.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBB-P2 yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. untuk...

BAB IV
KLASIFIKASI NJOP PBB-P2

Pasal 7

Klasifikasi NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikelompokkan pada:

- a. Klasifikasi NJOP Bumi; dan
- b. Klasifikasi NJOP Bangunan.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek PBB-P2 lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk objek PBB-P2 lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB V
PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 10

Besaran Nilai Jual Objek Pajak atas Objek PBB-P2 ditentukan sebagai berikut:

- a. Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16; dan
- b. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 17.

Pasal 11...

Pasal 11

Besaran Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut:

- a. areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
- b. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya; dan
- c. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17.

Pasal 12

- (1) Besaran Nilai Jual Objek Pajak atas objek pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut:
 - a. areal tanah adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - b. areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi nilai jual Objek Pajak permukaan bumi berupa tanah disekitarnya;
 - c. areal perairan untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah sebesar 10 x 10% (sepuluh persen) dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan; dan
 - d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 17.
- (2) Perhitungan besaran Nilai Jual Objek Pajak perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Besaran Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai.
- (2) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional yang melaksanakan penilaian.
- (3) Besaran Nilai Jual Objek Pajak atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 44);
 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 45);
 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 45);
 4. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penentuan Besarnya Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 70);
 5. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 38);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 19 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEP. DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU



NIP. 19710603 199803 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
1	2	3
001	> 67,390,000.00 s/d 69,700,000.00	68,545,000.00
002	> 65,120,000.00 s/d 67,390,000.00	66,255,000.00
003	> 62,890,000.00 s/d 65,120,000.00	64,005,000.00
004	> 60,700,000.00 s/d 62,890,000.00	61,795,000.00
005	> 58,550,000.00 s/d 60,700,000.00	59,625,000.00
006	> 56,440,000.00 s/d 58,550,000.00	57,495,000.00
007	> 54,370,000.00 s/d 56,440,000.00	55,405,000.00
008	> 52,340,000.00 s/d 54,370,000.00	53,355,000.00
009	> 50,350,000.00 s/d 52,340,000.00	51,345,000.00
010	> 48,400,000.00 s/d 50,350,000.00	49,375,000.00
011	> 46,490,000.00 s/d 48,400,000.00	47,445,000.00
012	> 44,620,000.00 s/d 46,490,000.00	45,555,000.00
013	> 42,790,000.00 s/d 44,620,000.00	43,705,000.00
014	> 41,000,000.00 s/d 42,790,000.00	41,895,000.00
015	> 39,250,000.00 s/d 41,000,000.00	40,125,000.00
016	> 37,540,000.00 s/d 39,250,000.00	38,395,000.00
017	> 35,870,000.00 s/d 37,540,000.00	36,705,000.00
018	> 34,240,000.00 s/d 35,870,000.00	35,055,000.00
019	> 32,650,000.00 s/d 34,240,000.00	33,445,000.00
020	> 31,100,000.00 s/d 32,650,000.00	31,875,000.00
021	> 29,590,000.00 s/d 31,100,000.00	30,345,000.00
022	> 28,120,000.00 s/d 29,590,000.00	28,855,000.00
023	> 26,690,000.00 s/d 28,120,000.00	27,405,000.00
024	> 25,300,000.00 s/d 26,690,000.00	25,995,000.00
025	> 23,950,000.00 s/d 25,300,000.00	24,625,000.00
026	> 22,640,000.00 s/d 23,950,000.00	23,295,000.00
027	> 21,370,000.00 s/d 22,640,000.00	22,005,000.00
028	> 20,140,000.00 s/d 21,370,000.00	20,755,000.00
029	> 18,950,000.00 s/d 20,140,000.00	19,545,000.00
030	> 17,800,000.00 s/d 18,950,000.00	18,375,000.00
031	> 16,690,000.00 s/d 17,800,000.00	17,245,000.00
032	> 15,620,000.00 s/d 16,690,000.00	16,155,000.00
033	> 14,590,000.00 s/d 15,620,000.00	15,105,000.00
034	> 13,600,000.00 s/d 14,590,000.00	14,095,000.00
035	> 12,650,000.00 s/d 13,600,000.00	13,125,000.00
036	> 11,740,000.00 s/d 12,650,000.00	12,195,000.00
037	> 10,870,000.00 s/d 11,740,000.00	11,305,000.00
038	> 10,040,000.00 s/d 10,870,000.00	10,455,000.00
039	> 9,250,000.00 s/d 10,040,000.00	9,645,000.00
040	> 8,500,000.00 s/d 9,250,000.00	8,875,000.00
041	> 7,790,000.00 s/d 8,500,000.00	8,145,000.00
042	> 7,120,000.00 s/d 7,790,000.00	7,455,000.00
043	> 6,490,000.00 s/d 7,120,000.00	6,805,000.00
044	> 5,900,000.00 s/d 6,490,000.00	6,195,000.00
045	> 5,350,000.00 s/d 5,900,000.00	5,625,000.00
046	> 4,840,000.00 s/d 5,350,000.00	5,095,000.00
047	> 4,370,000.00 s/d 4,840,000.00	4,605,000.00

KLAS	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
1	2	3
048	> 3,940,000.00 s/d 4,370,000.00	4,155,000.00
049	> 3,550,000.00 s/d 3,940,000.00	3,745,000.00
050	> 3,200,000.00 s/d 3,550,000.00	3,375,000.00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

Salinan dengan aslinya
 KEMENTERIAN AGRI
 BAGIAN HUKUM

 NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd.

REZITA MEYLANI YOPI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

KLAS	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/M ²)
1	2	3
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

Salinan dengan aslinya

KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 BAGIAN HUKUM



TR. 04/18/11 M.M.

NIP. 19710003 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI